



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN**

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710

---

Nomor : EK.2.1/392/D.I.M.EKON/11/2019  
Hal : Tindak Lanjut Rakorpusda TPID 2019  
Lampiran : -

19 November 2019

Kepada Yth.

- 1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM**
- 2. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM**

Di - Jakarta

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tanggal 21 November 2019 di Hotel Kartika Chandra Jakarta, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keppres No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan beranggotakan pimpinan kementerian/lembaga terkait termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. TPIP bertugas melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi nasional.
2. Rakorpusda merupakan salah satu forum koordinasi TPIP yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil Rakornas Pengendalian Inflasi tanggal 24 Juli 2019 yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI. Rakorpusda dihadiri oleh seluruh Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku ketua pelaksana harian TPID.
3. Beberapa isu yang terkemuka dalam rakorpusda diantaranya :
  - a) Pelaksanaan konversi penggunaan minyak tanah ke LPG belum berjalan optimal di Kabupaten Muna (Provinsi Sulawesi Tenggara). Keterbatasan pasokan minyak tanah maupun LPG telah menyebabkan kelangkaan dan harga yang relatif tinggi untuk kedua komoditas tersebut.
  - b) Pelaksanaan distribusi LPG bersubsidi dengan sistem terbuka juga sering menimbulkan permasalahan di daerah. Di Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur), penyaluran terbuka menyebabkan kenaikan permintaan dan mendorong harga LPG tidak stabil dan cenderung tinggi. Perwakilan TPID Paser mengusulkan agar pelaksanaan distribusi LPG subsidi secara tertutup dapat segera diterapkan secara nasional.


- c) Pemadaman listrik masih sering terjadi di Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku). Sebagai daerah penghasil ikan, pemadaman ini telah mengganggu produktivitas dan ketersediaan ikan dikarenakan *cold storage* tidak dapat berfungsi secara optimal. Dari 5 instalasi generator PLN yang ada, 4 unit dalam kondisi rusak berat, dan 1 unit dalam kondisi tidak optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mempertimbangkan pentingnya penciptaan stabilitas harga di tingkat daerah, maka sesuai dengan bidang tugas, dengan ini dimintakan bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan kepada kami langkah-langkah yang telah diambil atas beberapa isu tersebut dan dalam hal mengupayakan penyediaan komoditas energi yang bersubsidi dapat lebih tepat sasaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan  
Selaku**

**Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat**



**Iskandar Simorangkir**

**Tembusan Yth :**

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (sebagai laporan)
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Bupati Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
6. Bupati Buru Selatan, Provinsi Maluku